AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Nilai-Nilai Komunikasi Politik dalam Al-Qur'an Kajian tentang Sidq, Amanah, Tabayyun dan Moderasi Beragama

Irma Raswati[1], Jailani1[2], Lusiana Safara[3], Zainuddin Syarif[4] , Mahfida Inayati[5]

[1] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
[2] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
[3] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
[4] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
[5] Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

jailaniibnutori250805@gmail.com [1], irmaraswati937@gmail.com [2], lusianasyafara883@gmail.com [3], doktorzainuddinsyarif@gmail.com [4], mahfidainayati99@gmail.com [5]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 12 November 2026
Accepted 22 November 2026
Available online 23 November 2026

Kata Kunci:
komunikasi politik, Al-Qur'an, sidq, amanah, tabayyun, moderasi beragama.

Keywords:
political communication, the Qur'an, sidq, amanah, tabayyun, religious moderation..

This is an open access article under the CC BY-SA license.

ABSTRAK

Komunikasi politik memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta menciptakan kehidupan politik yang harmonis dan berkeadaban. Namun, praktik komunikasi politik sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, penyalahgunaan kepercayaan, manipulasi pesan, dan berkembangnya sikap intoleran di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an menawarkan nilai-nilai etis yang dapat dijadikan landasan dalam membangun komunikasi politik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai komunikasi politik dalam Al-Qur'an dengan berfokus pada empat konsep utama, yaitu sidq (kejujuran), amanah (tanggung jawab dan kepercayaan), tabayyun (verifikasi informasi), dan moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) serta metode tafsir tematik (maudhu'i) untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan nilai-nilai tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa sidq menjadi dasar bagi penyampaian pesan politik yang jujur dan bebas dari manipulasi, amanah menegaskan pentingnya integritas serta tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan dan menyampaikan informasi, sedangkan tabayyun berfungsi sebagai prinsip verifikasi untuk mencegah penyebaran berita bohong dan kesalahpahaman politik. Sementara itu, moderasi beragama menjadi landasan dalam membangun komunikasi politik yang adil, inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman. Keempat nilai tersebut saling melengkapi dalam membentuk etika komunikasi politik yang berlandaskan prinsip kebenaran, tanggung jawab, kehati-hatian, dan keseimbangan. Dengan demikian, nilai-nilai komunikasi politik dalam Al-Qur'an relevan untuk dijadikan pedoman normatif dalam menghadapi tantangan komunikasi politik kontemporer serta mendorong terciptanya kehidupan demokrasi yang bermartabat, damai, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

ABSTRACT

Political communication plays an important role in shaping public opinion, building public trust, and fostering a harmonious and civilized political environment. However, political communication practices often face various challenges, including the dissemination of false information, the abuse of public trust, message manipulation, and the rise of intolerance within society. In this context, the Qur'an offers ethical values that can serve as a foundation for developing responsible political communication oriented toward the common good. This study aims to examine the values of political communication in the Qur'an, focusing on four main concepts: sidq (truthfulness), amanah (trustworthiness and responsibility), tabayyun (information verification), and religious moderation. This study employs a qualitative method through library research and a thematic interpretation approach (tafsir maudhu'i) to identify and analyze Qur'anic verses relevant to these values. The findings indicate

that sidq serves as the foundation for truthful political messaging free from manipulation; amanah emphasizes the importance of integrity and moral responsibility in exercising power and conveying information; while tabayyun functions as a verification principle to prevent the spread of false information and political misunderstandings. Meanwhile, religious moderation provides a foundation for fostering fair, inclusive, tolerant, and diversity-respecting political communication. These four values complement one another in establishing political communication ethics grounded in truth, responsibility, prudence, and balance. Therefore, the values of political communication in the Qur'an are relevant as normative guidelines for addressing contemporary political communication challenges and promoting a dignified, peaceful, and public-oriented democratic life.

1. PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan demokrasi karena berperan dalam menyampaikan gagasan, membentuk opini publik, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjembatani kepentingan antara pemerintah dan warga negara. Melalui komunikasi politik, aktor politik menyampaikan visi, program, kebijakan, dan pesan-pesan politik kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan serta membangun legitimasi kekuasaan. Namun, komunikasi politik tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyampaian pesan, tetapi juga menyangkut dimensi etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, komunikasi politik kerap menghadapi berbagai persoalan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, manipulasi pesan, penyalahgunaan kepercayaan publik, dan penggunaan identitas agama untuk kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya landasan etis yang dapat mengarahkan komunikasi politik agar berlangsung secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.[1]

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik secara signifikan. Informasi politik dapat disebarluaskan dengan cepat dan menjangkau masyarakat dalam skala luas, tetapi kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran berita bohong, disinformasi, ujaran kebencian, serta narasi yang berpotensi memperkuat polarisasi sosial. Dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama, budaya, dan pandangan politik, komunikasi yang tidak bertanggung jawab dapat memicu kesalahpahaman dan memperburuk hubungan antarkelompok. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi politik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepentingan politik, tetapi juga memperhatikan kebenaran informasi, integritas komunikator, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi landasan normatif untuk mengembangkan praktik komunikasi politik yang beretika dan berkeadaban.

Al-Qur'an memuat berbagai prinsip moral yang relevan dengan aktivitas komunikasi dan kehidupan politik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain kejujuran (sidq), tanggung jawab dan kepercayaan (amanah), verifikasi informasi (tabayyun), serta moderasi beragama yang berorientasi pada keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Keempat nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam membangun komunikasi politik yang tidak hanya mengutamakan penyampaian pesan, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran isi pesan, tanggung jawab pihak yang menyampaikannya, validitas informasi yang beredar, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai komunikasi politik dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai prinsip etis yang menghubungkan dimensi individual, sosial, dan politik dalam mewujudkan kehidupan publik yang harmonis.

Prinsip sidq memperoleh landasan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 70 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan menyampaikan perkataan yang benar (qaulan sadidan). Ayat ini menegaskan pentingnya kebenaran dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk komunikasi politik yang berpengaruh terhadap pembentukan opini dan pengambilan keputusan masyarakat. Dalam konteks politik, sidq menuntut agar pesan yang disampaikan oleh pejabat publik, calon pemimpin, maupun komunikator politik tidak mengandung kebohongan, manipulasi fakta, atau janji yang menyesatkan. Sementara itu, prinsip amanah ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak

[1] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., "Etika Komunikasi dalam Islam."

dan keputusan ditetapkan secara adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa komunikasi politik harus dilandasi tanggung jawab moral, keterbukaan yang proporsional, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat.[2] Dengan demikian, sidq dan amanah menjadi dua landasan penting dalam membangun integritas komunikasi politik.

Selain kejujuran dan tanggung jawab, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya verifikasi informasi melalui prinsip tabayyun. QS. Al-Hujurat [49]: 6 memerintahkan orang beriman untuk memeriksa kebenaran berita yang diterima agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat tindakan yang didasarkan pada ketidaktahuan. Prinsip ini relevan dengan komunikasi politik kontemporer, terutama ketika informasi yang belum terverifikasi berpotensi membentuk opini publik, merusak reputasi seseorang, atau menimbulkan konflik antarkelompok. Tabayyun tidak hanya berkaitan dengan proses memeriksa kebenaran informasi, tetapi juga mencerminkan sikap kehati-hatian dan tanggung jawab sebelum menerima, mempercayai, atau menyebarkan suatu pesan. Oleh karena itu, penerapan prinsip tabayyun dalam komunikasi politik dapat membantu mendorong budaya informasi yang lebih kritis, akurat, dan bertanggung jawab.

Adapun moderasi beragama memberikan dimensi yang lebih luas dalam pembentukan etika komunikasi politik, khususnya dalam masyarakat yang majemuk. Konsep ummatan wasatan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 memberikan landasan mengenai umat yang berada pada posisi pertengahan, sedangkan QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa keberagaman manusia merupakan bagian dari ketetapan Allah yang menuntut adanya pengenalan dan penghormatan antarsesama. Dalam konteks komunikasi politik, nilai moderasi beragama dapat diwujudkan melalui penyampaian pesan yang adil, tidak provokatif, tidak merendahkan kelompok lain, serta tidak mengeksploitasi perbedaan agama untuk menciptakan permusuhan. Moderasi beragama juga tidak berarti menghilangkan perbedaan pandangan politik atau keyakinan, melainkan mengelola perbedaan tersebut secara proporsional dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama dapat menjadi prinsip etis untuk mencegah komunikasi politik yang eksklusif dan memperkuat kehidupan demokrasi yang inklusif.

Kajian mengenai komunikasi politik dalam perspektif Al-Qur'an telah dilakukan oleh Awla dan Rifai (2025) melalui artikel berjudul Political Communication in the Quranic Perspective: Ethical Principles for Contemporary Politics. Penelitian tersebut mengkaji prinsip-prinsip etika komunikasi politik yang bersumber dari Al-Qur'an, terutama kejujuran, keadilan, musyawarah, keterbukaan, dan transparansi. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'ani dapat menjadi landasan normatif bagi praktik komunikasi politik yang bertanggung jawab, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kontribusi penelitian tersebut terletak pada pengembangan pemahaman mengenai relevansi ajaran Al-Qur'an dalam membangun etika komunikasi politik kontemporer. Meskipun demikian, penelitian ini masih membuka ruang untuk mengkaji secara lebih terfokus hubungan antara kejujuran pesan (sidq), tanggung jawab komunikator (amanah), verifikasi informasi (tabayyun), dan moderasi beragama dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Solahudin (2025) melalui tesis berjudul Moderasi Beragama dalam Politik Perspektif Al-Qur'an. Penelitian tersebut membahas moderasi beragama dalam kehidupan politik berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an, dengan perhatian pada prinsip keseimbangan, keadilan, amanah, dan musyawarah. Kajian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan pentingnya moderasi beragama untuk mendorong kehidupan politik yang inklusif, toleran, dan bertanggung jawab. Namun, fokus utama penelitian tersebut adalah moderasi beragama dalam politik, sehingga aspek komunikasi politik, terutama mengenai kebenaran pesan, proses verifikasi informasi, dan tanggung jawab komunikator dalam menyampaikan narasi keagamaan, masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Kedua penelitian terdahulu tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini sekaligus menunjukkan adanya peluang untuk menghubungkan kajian etika komunikasi politik dengan prinsip-prinsip moderasi beragama secara lebih sistematis.[3]

[2] Puspitasari, "ETIKA KOMUNIKASI TENTANG KEJUJURAN DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN."
[3] Muhammad Torieq Abdillah, "Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik dan Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir al-Qurthubi."

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, kesenjangan penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya konsep sidq, amanah, tabayyun, dan moderasi beragama dalam satu kerangka analisis etika komunikasi politik berbasis Al-Qur'an pada kedua penelitian yang dikaji.[4] Penelitian Awla dan Rifai (2025) menekankan prinsip-prinsip etika komunikasi politik secara umum, sedangkan Solahudin (2025) berfokus pada moderasi beragama dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian yang secara khusus menjelaskan hubungan antara kebenaran pesan, tanggung jawab komunikator, verifikasi informasi, dan pengelolaan keberagaman sebagai unsur yang saling melengkapi dalam komunikasi politik. Kesenjangan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengembangkan pemahaman yang lebih integratif mengenai nilai-nilai komunikasi politik dalam perspektif Al-Qur'an.

penelitian ini terletak pada sintesis konseptual terhadap empat nilai utama Al-Qur'an dalam membangun kerangka etika komunikasi politik yang saling terhubung. Dalam kerangka tersebut, sidq diposisikan sebagai prinsip kebenaran pesan, amanah sebagai prinsip tanggung jawab dan integritas komunikator, tabayyun sebagai prinsip verifikasi informasi, sedangkan moderasi beragama sebagai prinsip pengelolaan perbedaan secara adil dan proporsional. Keempat nilai tersebut dianalisis bukan sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan etis untuk menjawab persoalan komunikasi politik kontemporer, khususnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, manipulasi pesan politik, dan polarisasi berbasis identitas keagamaan. Kebaruan penelitian ini dengan demikian terletak pada pengintegrasian dan penajaman fungsi keempat nilai tersebut dalam konteks komunikasi politik, bukan pada klaim bahwa konsep-konsep tersebut belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan Al-Qur'an mengenai sidq, amanah, tabayyun, dan moderasi beragama; menjelaskan keterkaitan keempat nilai tersebut dalam membentuk etika komunikasi politik; serta menguraikan relevansinya dalam menghadapi tantangan komunikasi politik kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Data penelitian bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, kitab tafsir, serta literatur ilmiah mengenai komunikasi politik Islam dan moderasi beragama. Data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi makna setiap konsep, menghubungkannya dengan prinsip etika komunikasi, dan merumuskan relevansinya bagi praktik komunikasi politik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian komunikasi politik Islam serta kontribusi praktis berupa landasan normatif untuk membangun komunikasi politik yang jujur, bertanggung jawab, kritis terhadap informasi, dan menghargai keberagaman dalam kehidupan demokrasi

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji nilai-nilai komunikasi politik dalam Al-Qur'an yang meliputi sidq (kejujuran), amanah (kepercayaan dan tanggung jawab), tabayyun (verifikasi informasi), dan moderasi beragama. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan merujuk pada kitab tafsir seperti Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas komunikasi politik Islam, etika komunikasi, dan moderasi beragama. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan berdasarkan empat konsep utama penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi ayat, penelaahan penafsiran, pengelompokan tema, dan analisis kontekstual untuk menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan persoalan komunikasi politik kontemporer. Dalam analisis tersebut, sidq dipahami sebagai prinsip kebenaran pesan, amanah sebagai prinsip tanggung jawab komunikator, tabayyun sebagai prinsip verifikasi informasi, dan moderasi beragama sebagai prinsip pengelolaan perbedaan secara adil dan

[4] Kebangsaan dkk., *KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS AL- QUR ' AN : PREFERENSI PEMILIH MUSLIM DALAM PEMILU DI INDONESIA POLITICAL COMMUNICATION BASED ON THE AL-QUR , AN : MUSLIM VOTERS '.*

proporsional. Selanjutnya, keempat nilai tersebut disintesiskan untuk merumuskan kerangka etika komunikasi politik yang berlandaskan Al-Qur'an, dengan memperhatikan konteks ayat, penafsiran para mufasir, dan relevansinya terhadap tantangan komunikasi politik masa kini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sidq Sebagai Landasan Kejujuran Dalam Komunikasi Politik

Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak sekadar dipahami sebagai kegiatan menyampaikan pesan atau informasi, tetapi juga merupakan aktivitas yang memiliki dimensi etis dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memberikan berbagai pedoman dalam berkomunikasi, di antaranya qaulan sadīdan yang berarti perkataan yang benar, qaulan balīghan yang berarti perkataan yang efektif dan mampu memberikan pengaruh, serta qaulan layyinan yang berarti perkataan yang lembut. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam membangun komunikasi yang beretika, termasuk dalam bidang politik.[5] Komunikasi politik memiliki posisi yang penting karena pesan yang disampaikan oleh pemerintah, pejabat publik, partai politik, maupun aktor politik lainnya dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu persoalan dan membentuk kepercayaan publik. Oleh karena itu, komunikasi politik dalam Islam perlu berpedoman pada nilai kejujuran, amanah, keadilan, tabayyun, dan kemaslahatan.

Salah satu prinsip utama dalam komunikasi politik Islam adalah ṣidq. Secara bahasa, ṣidq mengandung makna benar, jujur, tulus, serta sesuai dengan kenyataan.[6] Dalam konteks komunikasi politik, ṣidq dapat dipahami sebagai kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan fakta yang sebenarnya, sekaligus adanya keselarasan antara perkataan, niat, dan tindakan. Prinsip ini mengharuskan komunikator politik menyampaikan informasi secara jujur serta menghindari kebohongan, manipulasi, maupun perubahan fakta yang dilakukan untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Kejujuran dalam komunikasi politik menjadi penting karena informasi politik tidak hanya berkaitan dengan kepentingan komunikator, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.[7]

Landasan mengenai kewajiban berkata benar dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Aḥzāb 33: 70).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dalam perkataan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang Muslim. Konsep qaulan sadīdan memiliki hubungan erat dengan komunikasi politik karena setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat seharusnya didasarkan pada kebenaran dan tidak diarahkan untuk menyesatkan publik. Dalam penyampaian informasi pemerintahan, misalnya, kebijakan publik, program kerja, keberhasilan, maupun persoalan yang sedang dihadapi perlu disampaikan secara jujur, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip ṣidq juga memiliki hubungan yang erat dengan tabayyun, terutama dalam menghadapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai hal tersebut melalui firman Allah Swt.:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Ḥujurāt 49: 6).

Ayat tersebut menjadi dasar penting bagi penerapan tabayyun, yaitu sikap memeriksa, meneliti, dan mengklarifikasi suatu informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Dalam komunikasi politik, prinsip ini sangat penting karena informasi yang tidak benar dapat memengaruhi persepsi masyarakat, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memicu konflik. Dengan demikian, ṣidq dan tabayyun mempunyai fungsi yang saling melengkapi.Dewi, *Kejujuran dan Verifikasi Informasi dalam Komunikasi Digital : Analisis Etika Qur ' ani terhadap QS . Al -A*

[5] Jeddah Dawi Patamatta and others, 'LEGITIMASI KEKUASAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN DAN HUKUM ISLAM : ANALISIS', 10.1 (2026), 27–38

[6] *Ibid*

[7] Lutfhi, *ETIKA ISLAM DALAM PRAKTIK KOMUNIKASI : KAJIAN ETIKA KOMUNIKASI ANTARPRIBADI DAN KOMUNIKASI*.

ḥ z ā b [33]: 70. Ṣidq menjadi dasar moral untuk menyampaikan kebenaran, sedangkan tabayyun menjadi langkah untuk memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan memang memiliki dasar yang benar.

Nilai kejujuran juga ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 119:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. At-Taubah 9: 119).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kejujuran perlu menjadi bagian dari karakter seorang Muslim. Jika diterapkan dalam komunikasi politik, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui keterbukaan dalam memberikan informasi, menjaga kebenaran pesan, serta menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Dengan demikian, seorang komunikator politik tidak cukup hanya memiliki kemampuan menyampaikan pesan secara menarik, tetapi juga perlu menunjukkan integritas dalam melaksanakan apa yang telah disampaikannya kepada masyarakat.

Prinsip ṣidq selanjutnya dapat dikaitkan dengan kewajiban menepati janji sebagaimana terdapat dalam QS. An-Naḥl ayat 91

"Dan tepatilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah itu. Sungguh, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Naḥl 16: 91).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa kejujuran tidak hanya berkaitan dengan benar atau tidaknya suatu ucapan, tetapi juga menyangkut kesungguhan seseorang dalam memenuhi komitmen. Dalam komunikasi politik, hal ini dapat diterapkan pada penyampaian janji, program, dan komitmen kepada masyarakat. Janji politik mengandung tanggung jawab sehingga tidak semestinya hanya digunakan sebagai sarana memperoleh dukungan. Berdasarkan prinsip ṣidq, setiap janji atau program yang disampaikan kepada masyarakat perlu didasarkan pada kondisi yang sebenarnya dan kemampuan untuk merealisasikannya.

Hal tersebut juga berkaitan dengan QS. An-Naḥl ayat 92:

"Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, karena ada satu umat yang lebih banyak daripada umat yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan." (QS. An-Naḥl [16]: 92).

Ayat tersebut menggambarkan bahwa perjanjian yang telah dibangun tidak seharusnya dirusak melalui pengingkaran maupun penipuan. Dalam komunikasi politik, pesan yang dapat diambil adalah bahwa janji dan komitmen kepada masyarakat harus disampaikan secara bertanggung jawab. Penggunaan janji sebagai sarana memengaruhi masyarakat tanpa adanya kesungguhan untuk merealisasikannya tidak sejalan dengan nilai kejujuran dan amanah. Dengan demikian, ṣidq dalam komunikasi politik bukan hanya menuntut kebenaran dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menuntut konsistensi dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan.Aldiansyah dkk., *Kejujuran dalam Perspektif Hadis : Kajian terhadap Peran Kejujuran dalam Membangun Karakter Muslim dalam Kehidupan Sehari-hari*.

Keutamaan kejujuran juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

"Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang senantiasa berkata benar hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan sesungguhnya kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan karakter yang terbentuk melalui kebiasaan dan konsistensi. Dalam komunikasi politik, integritas seorang komunikator tidak hanya dapat dilihat dari satu pernyataan, tetapi juga dari konsistensinya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan tanggung jawab. Kebiasaan menyampaikan informasi secara benar dapat membangun kepercayaan, sedangkan kebohongan dan manipulasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap komunikator maupun lembaga yang diwakilinya.[8]

Dalam perkembangan komunikasi politik di era digital, penerapan prinsip ṣidq menjadi semakin penting. Media sosial memungkinkan informasi disampaikan dengan cepat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang luas. Pemerintah, pejabat publik, partai politik, dan

[8] *Ibid*

masyarakat dapat berinteraksi melalui berbagai platform digital. Kebijakan dapat disampaikan secara langsung, masyarakat dapat memberikan kritik, dan tanggapan terhadap kebijakan dapat berkembang secara terbuka. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki tantangan karena informasi yang keliru, potongan pernyataan yang tidak utuh, maupun narasi yang provokatif dapat menyebar dengan cepat.

Media sosial juga menyebabkan batas antara komunikasi pribadi dan komunikasi politik menjadi semakin sulit dibedakan. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang aktor politik melalui akun media sosial dapat dipahami sebagai representasi sikap politik, khususnya apabila orang tersebut memiliki jabatan publik atau mewakili suatu lembaga. Oleh karena itu, setiap penggunaan media sosial membutuhkan kehati-hatian dan tanggung jawab. Setiap unggahan, komentar, maupun pernyataan dapat ditafsirkan, dikutip, dan disebarluaskan kembali oleh masyarakat sehingga komunikator politik perlu mempertimbangkan dampak dari pesan yang disampaikannya.

Sifat media sosial yang interaktif juga telah mengubah pola komunikasi politik. Masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, menyampaikan kritik, serta menyebarluaskan kembali pesan yang diterimanya.Damanik dkk., *Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan*. Kondisi tersebut menjadikan komunikasi politik lebih bersifat dua arah. Oleh sebab itu, aktor politik tidak hanya perlu menyampaikan informasi secara satu arah atau menampilkan keberhasilan yang dimilikinya, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Dalam perspektif ṣidq, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari komunikasi yang bertanggung jawab karena komunikasi publik tidak semestinya hanya diarahkan untuk membangun citra.

Dalam hal ini, penggunaan komunikasi politik untuk membangun citra perlu dilakukan secara proporsional dan tetap berlandaskan kejujuran. Membangun citra melalui komunikasi publik tidak secara otomatis bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Persoalan etis muncul apabila pencitraan dilakukan dengan menyembunyikan fakta penting, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, memanipulasi opini, atau menyebarkan pesan yang dapat menyesatkan masyarakat. Prinsip ṣidq mengarahkan agar komunikasi politik tetap mengutamakan kebenaran, meskipun informasi yang disampaikan tidak selalu memberikan keuntungan terhadap citra komunikator.[9]

Komunikasi politik dalam perspektif Islam juga memiliki hubungan erat dengan prinsip amanah. Kekuasaan dan jabatan merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh pemegang kekuasaan seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang benar, bukan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan atau membangun citra pribadi. Dalam hubungan tersebut, ṣidq dan amanah saling melengkapi.*No Title*. Ṣidq menekankan kejujuran dalam menyampaikan pesan, sedangkan amanah menekankan tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan dan komunikasi untuk kepentingan masyarakat.

Selain amanah, prinsip ṣidq juga berkaitan dengan keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Informasi yang tidak benar dapat merugikan individu atau kelompok tertentu, menimbulkan kesalahpahaman, memperbesar konflik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang jujur, terbuka, dan proporsional dapat membantu masyarakat memahami persoalan publik secara lebih tepat. Dengan demikian, kejujuran dalam komunikasi politik tidak hanya menjadi persoalan akhlak individu, tetapi juga mempunyai dampak terhadap terciptanya hubungan sosial yang adil, harmonis, dan saling percaya.

Penerapan ṣidq dalam komunikasi politik digital dapat dilakukan melalui beberapa bentuk nyata. Komunikator perlu memastikan sumber informasi sebelum menyampaikan atau membagikannya, membedakan antara fakta dan pendapat, mempertahankan konteks asli suatu informasi, serta menghindari penyebaran berita yang belum terverifikasi. Apabila terdapat kesalahan informasi, komunikator perlu memberikan klarifikasi secara terbuka. Selain itu, informasi tidak seharusnya digunakan untuk memprovokasi, memfitnah, atau memengaruhi masyarakat melalui cara-cara yang menyesatkan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ṣidq dan tabayyun bukan hanya prinsip normatif dalam Al-Qur’an, tetapi juga dapat menjadi pedoman

[9] *Ibid*

praktis dalam membangun komunikasi politik yang jujur dan bertanggung jawab di era digital.*Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta*.

B. Amanah Sebagai Prinsip Tanggung Jawab Dalam Komunikasi Politik

Dalam ajaran Islam, amanah merupakan nilai penting yang harus melekat pada setiap individu yang memperoleh kepercayaan, terutama mereka yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin atau aktor politik. Amanah tidak sebatas bermakna dapat dipercaya, tetapi juga mencakup kesungguhan dalam menjalankan tugas secara jujur, adil, profesional, serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam komunikasi politik, prinsip amanah menjadi sangat penting karena berbagai informasi, kebijakan, pernyataan, dan janji yang disampaikan kepada masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dapat dipertanggungjawabkan.[10]

Secara bahasa, amanah berasal dari kata Arab الأمانة (al-amānah) yang mengandung makna kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Dalam konteks kepemimpinan, amanah berarti menjalankan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan serta tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, jabatan politik dalam perspektif Islam bukanlah sekadar kedudukan yang memberikan kekuasaan, melainkan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah Swt. dan kepada masyarakat.

Prinsip amanah ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah Swt.:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisā' 4: 58).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa amanah memiliki keterkaitan erat dengan keadilan. Menjalankan amanah bukan hanya berarti menjaga kepercayaan, tetapi juga memastikan bahwa suatu hak, kewenangan, atau tanggung jawab diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang semestinya.Ahadah dkk., *Tafsir Ayat-Ayat Amanah dan Partisipasi Perempuan di Ruang Politik Digital*. Dalam komunikasi politik, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi secara benar, terbuka, proporsional, dan tidak diarahkan untuk merugikan masyarakat atau menguntungkan kepentingan tertentu secara tidak etis.

Komunikasi mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan politik karena berbagai kepentingan masyarakat, kebijakan pemerintah, keputusan politik, serta aspirasi publik disampaikan melalui komunikasi. Pemimpin, wakil rakyat, pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan gagasan sekaligus membangun hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral. Informasi politik yang diterima masyarakat dapat memengaruhi pemahaman, penilaian, serta sikap mereka terhadap suatu persoalan publik.

Berdasarkan hal tersebut, prinsip amanah mengharuskan komunikasi politik digunakan secara bertanggung jawab. Informasi tidak seharusnya sengaja disembunyikan apabila berkaitan dengan kepentingan publik, begitu pula pesan politik tidak seharusnya disusun dengan cara yang menyesatkan masyarakat. Seorang komunikator politik perlu memahami bahwa informasi yang disampaikannya dapat menimbulkan dampak yang luas. Karena itu, setiap pesan harus mempertimbangkan kebenaran informasi, tujuan penyampaian, manfaat, serta kemungkinan dampaknya bagi masyarakat.

Amanah juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep tanggung jawab atau mas'ūliyyah (المسؤولية). Jika amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, maka mas'ūliyyah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut. Dalam kepemimpinan politik, jabatan yang diperoleh merupakan amanah yang menuntut pemimpin untuk bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, serta komunikasi yang dilakukan. Dengan

[10] Etika, *Mirza Shahreza*.

demikian, kualitas komunikasi politik tidak hanya dapat dilihat dari kemampuan menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga dari kesediaan komunikator mempertanggungjawabkan pesan tersebut.

Prinsip tanggung jawab tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isrā' 17: 36).

Ayat tersebut memberikan pedoman agar seseorang tidak mengikuti ataupun menyampaikan sesuatu yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang jelas. Dalam komunikasi politik, prinsip ini dapat diterapkan dengan melakukan kehati-hatian sebelum menerima, mengolah, maupun menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang belum diketahui kebenarannya tidak seharusnya disampaikan secara langsung karena setiap informasi memiliki konsekuensi dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan.Janji dkk., *PENYEBAB POLITICAL DISTRUST PERSPEKTIF AL- QUR ' AN (Analisis Tafsir Maudhu ' i Ayat-ayat Tentang Amanah Dan*.

Nilai amanah dalam kepemimpinan juga dapat dilihat melalui keteladanan Rasulullah saw. yang dikenal memiliki sifat ṣidq, amanah, tablīgh, dan faṭānah. Ṣidq menunjukkan kejujuran, amanah menunjukkan sikap dapat dipercaya, tablīgh berarti menyampaikan ajaran dan kebenaran, sedangkan faṭānah menunjukkan kecerdasan serta kebijaksanaan. [11] Keempat sifat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam mengelola kekuasaan, tetapi juga memerlukan integritas moral dan kecakapan dalam berkomunikasi.

Keteladanan Rasulullah saw. ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." (QS. Al-Aḥzāb 33: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam perlu dibangun berdasarkan keteladanan. Dalam komunikasi politik, keteladanan dapat diwujudkan melalui keselarasan antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan.Kebangsaan dkk., *KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS AL- QUR ' AN : PREFERENSI PEMILIH MUSLIM DALAM PEMILU DI INDONESIA POLITICAL COMMUNICATION BASED ON THE AL-QUR , AN : MUSLIM VOTERS '*. Ketika seorang pemimpin menyampaikan program, kebijakan, atau komitmen kepada masyarakat, pesan tersebut idealnya diikuti dengan tindakan nyata. Dengan demikian, komunikasi politik tidak berhenti pada penyampaian janji atau pernyataan, tetapi diwujudkan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan pesan yang telah disampaikan.

Prinsip amanah juga berkaitan dengan kewajiban memenuhi janji. Allah Swt. berfirman:

Dan tepatilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah itu. Sungguh, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Naḥl 16: 91).

Dalam komunikasi politik, ayat tersebut dapat dikaitkan dengan penyampaian program, janji, dan komitmen kepada masyarakat. Pernyataan politik yang disampaikan kepada publik tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai sarana untuk memperoleh perhatian atau dukungan. Setiap janji memiliki konsekuensi moral sehingga perlu disampaikan berdasarkan kemampuan dan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, amanah menuntut adanya kesesuaian antara komitmen yang disampaikan dengan usaha untuk merealisasikannya.

Amanah dalam komunikasi politik juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dan informasi digunakan. Seorang pemimpin tidak seharusnya menggunakan komunikasi hanya untuk mempertahankan citra pribadi atau kepentingan kelompoknya. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu disampaikan dengan mempertimbangkan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat. Dalam hal ini, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari penerapan amanah dalam komunikasi politik.

Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat pentingnya prinsip amanah. Kehadiran media sosial memungkinkan pemerintah, pejabat publik, dan aktor politik

[11] *Ibid*

menyampaikan informasi secara cepat serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kebijakan dapat dijelaskan melalui media digital, masyarakat dapat menyampaikan kritik, dan berbagai aspirasi publik dapat memperoleh perhatian secara lebih cepat. Namun, kemudahan tersebut juga disertai tanggung jawab karena informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat tersebar luas dan diteruskan kembali oleh pengguna lain.

Sifat media sosial yang interaktif juga menyebabkan komunikasi politik tidak lagi berlangsung secara satu arah. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, menyampaikan kritik, serta menyebarkan kembali pesan yang diterimanya. Kondisi ini mengharuskan aktor politik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Pernyataan yang dibuat oleh pejabat publik melalui media sosial dapat dipahami sebagai representasi dari posisi atau lembaga yang diwakilinya. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa, penyampaian informasi, respons terhadap kritik, dan pembedaan antara pendapat pribadi dengan pernyataan resmi perlu dilakukan secara bijaksana.Azizah dkk., *Issn 3030-8917 123*.

Dalam perspektif amanah, komunikasi politik sebaiknya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima pesan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik.Islam dan Alauddin, *Analisis konsep amanah dan tanggung jawab dalam kepemimpinan pendidikan islam 1,2,3*. Kesediaan pemimpin untuk mendengarkan masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Komunikasi dua arah dapat membantu menciptakan keterbukaan serta mengurangi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.

Amanah juga memiliki keterkaitan dengan prinsip tabayyun. Ṣidq menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran, sedangkan tabayyun mengajarkan agar informasi diperiksa terlebih dahulu sebelum diterima atau disebarluaskan.Perspektif dan An, *Journal of Islamic Education Management*. Kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam membangun komunikasi politik yang bertanggung jawab. Seorang komunikator politik yang amanah tidak hanya dituntut untuk berkata jujur, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, amanah juga berkaitan dengan prinsip ‘adl atau keadilan dan maṣlaḥah atau kemaslahatan. Komunikasi politik yang berlandaskan amanah perlu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas serta menghindari penyampaian informasi yang sengaja merugikan pihak tertentu. Informasi politik tidak seharusnya digunakan untuk memperuncing konflik, menyebarkan fitnah, atau memanipulasi persepsi masyarakat. Sebaliknya, komunikasi perlu diarahkan pada terciptanya pemahaman yang baik, hubungan sosial yang harmonis, serta kepentingan bersama.[12]

C. Tabayyun Sebagai Prinsip Verifikasi Informasi Politik

Tabayyun merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam yang mengajarkan seseorang untuk memeriksa, meneliti, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Prinsip ini memiliki dasar yang kuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, yang memberikan peringatan agar orang beriman melakukan pemeriksaan terhadap berita yang datang sebelum mengambil suatu tindakan. Dalam konteks komunikasi politik, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena informasi politik dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap tokoh, kebijakan, kelompok, maupun persoalan publik. Penelitian mengenai politik deepfake di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip tabayyun dapat digunakan sebagai mekanisme verifikasi informasi untuk menghadapi manipulasi informasi terhadap tokoh publik.[13]

Penerapan tabayyun dalam informasi politik berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap sumber dan isi informasi. Ketika masyarakat memperoleh informasi mengenai pernyataan seorang tokoh politik, kebijakan pemerintah, aktivitas partai, atau suatu peristiwa politik, informasi tersebut tidak seharusnya langsung diterima sebagai sebuah fakta. Masyarakat perlu memperhatikan siapa yang menyampaikan informasi, dari mana sumbernya, kapan informasi tersebut dibuat, dan apakah terdapat sumber lain yang dapat menguatkannya. Sikap tersebut penting

[12] *Ibid*

[13] Siti N. Hikmah, “Politik Deepfake Di Indonesia: Integrasi Tabayyun Dan Falsafah Dayak Belom Bahadat Dalam Merespons Manipulasi Tokoh Publik,” Dinuna: Journal of Religious Studies 2, no. 1 (2026), https://doi.org/10.24252/dinuna.v2i1.66042.

karena perkembangan media digital telah mempercepat penyebaran informasi politik kepada masyarakat. Penelitian tentang komunikasi politik Islam di era konvergensi media menunjukkan bahwa perkembangan media digital membuat masyarakat dapat memperoleh informasi politik dengan cepat dan dalam jumlah yang besar.[14]

Tabayyun juga menuntut seseorang untuk tidak hanya melihat isi informasi secara sekilas, tetapi memperhatikan konteks informasi secara keseluruhan. Sebuah pernyataan politik dapat mengalami perubahan makna ketika hanya sebagian kalimat atau potongan video yang ditampilkan. Oleh sebab itu, proses verifikasi perlu dilakukan dengan mencari sumber asli dan melihat informasi secara utuh. Penelitian tentang tabayyun di media sosial menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan kemudahan akses media sosial turut membuka ruang yang luas bagi penyebaran berita bohong, termasuk berita yang berkaitan dengan persoalan politik. Karena itu, penerapan sikap kritis dan tabayyun diperlukan agar masyarakat tidak menerima informasi secara mentah.[15]

Prinsip tabayyun juga berkaitan dengan kemampuan membedakan antara fakta, opini, interpretasi, dan informasi yang belum terbukti. Dalam komunikasi politik, keempat hal tersebut sering kali muncul secara bersamaan sehingga masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengenalinya. Informasi yang disampaikan seseorang belum tentu seluruhnya merupakan fakta, sebab sebagian dapat berupa pendapat atau penafsiran terhadap suatu peristiwa. Dengan menerapkan tabayyun, masyarakat didorong untuk mencari bukti sebelum menjadikan suatu informasi sebagai dasar dalam membentuk pandangan. Penelitian mengenai etika komunikasi dalam Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya nilai kejujuran dan perkataan yang benar dalam komunikasi, termasuk dalam komunikasi politik.[16]

Penerapan tabayyun menjadi semakin penting ketika informasi politik beredar melalui media sosial. Media sosial memungkinkan setiap orang menjadi penerima sekaligus penyebar informasi. Akibatnya, informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau banyak orang. Penelitian mengenai berita hoaks menunjukkan bahwa informasi palsu yang beredar melalui media digital dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan berpotensi menimbulkan perbedaan, perpecahan, serta keributan di tengah masyarakat.[17] Oleh karena itu, sebelum membagikan suatu informasi politik, seseorang perlu memastikan bahwa informasi tersebut memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks politik, tabayyun juga berfungsi untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak tertentu. Informasi politik yang tidak benar dapat memengaruhi citra seorang tokoh, kelompok masyarakat, ataupun lembaga tertentu. Penelitian mengenai pencegahan berita hoaks dalam perspektif siyasah syar'iyyah menjelaskan bahwa perintah tabayyun merupakan bentuk verifikasi terhadap informasi yang diterima sekaligus upaya mencegah penyebaran berita yang mengandung fitnah. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa pencegahan penyebaran hoaks merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat.[18]

Tabayyun tidak berarti masyarakat harus menolak seluruh informasi yang beredar di media sosial. Sebaliknya, tabayyun mengajarkan agar informasi diterima secara hati-hati dengan melakukan pemeriksaan yang memadai. Salah satu bentuk penerapannya adalah membandingkan informasi dari beberapa sumber yang dapat dipercaya. Jika terdapat informasi mengenai suatu kebijakan atau pernyataan politik, masyarakat dapat mencari dokumen resmi, pernyataan langsung

[14] Firdaus Muhammad dan Irwan, "Diseminasi Komunikasi Politik Islam dan Dakwah Era Konvergensi Media Digital," Jurnal Dakwah Tabligh 24, no. 1 (2023), https://doi.org/10.24252/jdt.v24i1.41657.
[14] Iffah Al Walidah, "Tabayyun di Era Generasi Millenial," Jurnal Living Hadis 2, no. 1 (2017), https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1359.
[15] Iffah Al Walidah, "Tabayyun di Era Generasi Millenial," Jurnal Living Hadis 2, no. 1 (2017), https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1359.
[16] Muh. Syawir Dahlan, "Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an dan Hadis," Jurnal Dakwah Tabligh 15, no. 1 (2014), https://doi.org/10.24252/jdt.v15i1.342.
[17] Iden Bardan Bayunugraha, "Menaikkan Kesadaran Masyarakat di Dadapan terhadap Berita Hoaks pada Masa Pandemi," Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama 21, no. 2 (2021): 165–172, https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i2.2587.
[18] Adityawarman dan Darussalam Syamsuddin, "Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Syar'iyyah," Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3, no. 1 (2022), https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i1.23779.

dari pihak yang bersangkutan, maupun pemberitaan dari media yang memiliki standar jurnalistik. Dengan demikian, seseorang tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi yang belum tentu memberikan gambaran secara lengkap.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan semakin memperkuat kebutuhan terhadap prinsip tabayyun. Kemunculan deepfake, misalnya, memungkinkan gambar, suara, maupun video dimanipulasi sehingga seseorang dapat terlihat atau terdengar seolah-olah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah disampaikan. Penelitian terbaru mengenai politik deepfake di Indonesia secara khusus menyatakan bahwa tabayyun dapat berfungsi sebagai mekanisme verifikasi informasi dalam menghadapi manipulasi tokoh publik.[1] Selain itu, penelitian mengenai tata kelola jurnalisme Islam pada era post-truth mengusulkan real-time tabayyun verification sebagai salah satu unsur dalam penguatan etika dan ketahanan informasi di lingkungan digital.[19]

Dalam kehidupan demokratis, tabayyun dapat membantu menciptakan komunikasi politik yang lebih bertanggung jawab. Perbedaan pilihan dan pandangan politik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi perbedaan tersebut seharusnya tidak dibangun berdasarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Tabayyun mendorong masyarakat untuk memastikan terlebih dahulu informasi yang menjadi dasar pembicaraan politik. Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan antara kritik yang didasarkan pada fakta dengan tuduhan yang hanya didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi.

D. Moderasi Beragama Sebagai Etika Komunikasi Politik Dalam Masyarakat Yang Beragam

Moderasi beragama merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun etika komunikasi politik di tengah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan pandangan politik. Dalam konteks kehidupan demokrasi, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, gagasan, dan kepentingan politik, tetapi juga menjadi ruang interaksi yang mempertemukan berbagai identitas dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi politik membutuhkan landasan etis yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Tanpa landasan tersebut, komunikasi politik berpotensi berkembang menjadi sarana provokasi, manipulasi opini publik, penyebaran kebencian, dan pembentukan polarisasi sosial. Dalam perspektif Islam, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai salah satu landasan normatif untuk mengarahkan komunikasi politik agar berlangsung secara adil, proporsional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.[20]

Secara konseptual, moderasi beragama berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara seimbang, tidak berlebihan, serta tidak meremehkan prinsip-prinsip keagamaan. Moderasi tidak berarti mengurangi keyakinan terhadap ajaran agama, mencampuradukkan akidah, atau menghilangkan identitas keagamaan seseorang. Sebaliknya, moderasi beragama menekankan pentingnya menempatkan ajaran agama secara proporsional dalam kehidupan sosial, termasuk ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan politik. Dalam konteks komunikasi politik, prinsip tersebut mengarahkan individu dan kelompok untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa merendahkan pihak lain, memaksakan pandangan, atau menjadikan perbedaan identitas sebagai dasar permusuhan. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki

[19] M. Yoserizal Saragih, Afwan Syahril Manurung, dan Robijaona Rahelivololoniaina Baholy, "Islamic Journalism Governance in the Post-Truth Era: A Maqasid-Based Framework for Strengthening National Resilience," Profetik: Jurnal Komunikasi 19, no. 1 (2026): 122–147.

[20] Aris Suhendar, Krissi Wahyuni Saragih, Ahmad Bakri, dan Nurul Hikmah, "Polarisasi Politik dalam Era Media Sosial: Kajian Bibliometrik Etika Komunikasi Politik dan Relevansi Siyasah Syar'iyyah," Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7, no. 1 (2026): 25–39, https://doi.org/10.36985/c2ycyq62

dimensi moral sekaligus sosial karena berkaitan dengan cara seseorang memahami keyakinannya dan memperlakukan orang lain dalam kehidupan bersama.[21]

Landasan normatif moderasi beragama dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah \[2\]: 143 yang menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan. Allah SWT berfirman:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (QS. Al-Baqarah \[2\]: 143).

Konsep ummatan wasatan menjadi salah satu dasar penting dalam memahami moderasi beragama berdasarkan Al-Qur'an. Istilah wasat mengandung makna pertengahan dan berkaitan dengan nilai keadilan serta pilihan yang baik. Dalam kehidupan sosial dan politik, prinsip ini dapat dipahami sebagai tuntutan untuk menghindari sikap berlebihan, fanatisme yang merusak, dan penilaian yang tidak adil terhadap kelompok lain. Apabila dikaitkan dengan komunikasi politik, nilai wasathiyah mengarahkan komunikator untuk menyampaikan pesan secara proporsional, mempertimbangkan fakta, dan tidak mengeksploitasi sentimen keagamaan demi kepentingan politik tertentu. Prinsip ini juga mengharuskan masyarakat untuk tidak menerima atau menolak suatu gagasan semata-mata berdasarkan identitas kelompok yang menyampaikannya, tetapi mempertimbangkan substansi, kebenaran, dan dampak dari gagasan tersebut.[22]

Dalam praktik komunikasi politik, prinsip moderasi tidak berarti menghilangkan perbedaan pendapat atau menghindari kritik terhadap pemerintah dan aktor politik. Kritik merupakan bagian penting dari demokrasi karena dapat menjadi sarana pengawasan terhadap kekuasaan dan mendorong perbaikan kebijakan publik. Namun, kritik perlu disampaikan berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui penghinaan, fitnah, atau penggunaan identitas agama untuk merendahkan lawan politik. Dengan demikian, moderasi beragama berperan membangun keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis. Masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan politiknya, tetapi hak tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan hak orang lain, menjaga kehormatan sesama, dan menghindari tindakan yang dapat merusak kehidupan bersama.[23]

Selain QS. Al-Baqarah \[2\]: 143, prinsip penghormatan terhadap keberagaman juga ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat \[49\]: 13. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS. Al-Hujurat \[49\]: 13).

---

[21] Choirul Salim, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk Membentuk Generasi Millenial Ummatan Washatan," Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama 3, no. 1 (2023): 34–40, https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.5681

[22] *Ibid*

[23] Muhammad Abqa, "Partai Politik dan Moderasi Beragama sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia," RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual 2, no. 1 (2020): 1–12, https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27

Ayat tersebut menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia yang memiliki tujuan sosial, yaitu agar manusia saling mengenal. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pesan ini relevan untuk membangun komunikasi politik yang mengakui keberadaan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan orientasi politik. Perbedaan tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk menciptakan hierarki sosial yang diskriminatif atau menganggap kelompok tertentu tidak layak berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sebaliknya, komunikasi politik perlu membuka ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi secara setara.[24]

Nilai lita'arafu atau saling mengenal dalam ayat tersebut dapat dikembangkan sebagai prinsip dialog dalam komunikasi politik. Dialog menghendaki adanya kesediaan untuk mendengarkan, memahami sudut pandang pihak lain, dan mencari titik temu tanpa harus menghapus perbedaan keyakinan maupun kepentingan. Dalam komunikasi politik yang sehat, perbedaan tidak selalu harus diselesaikan melalui penyeragaman pandangan, tetapi dapat dikelola melalui musyawarah, argumentasi rasional, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, tetapi juga dengan cara masyarakat menghadapi perbedaan pilihan politik di antara sesama pemeluk agama. Perbedaan dukungan terhadap calon pemimpin, partai politik, atau kebijakan publik tidak seharusnya menjadi dasar untuk memutus hubungan sosial atau meniadakan martabat pihak yang berbeda pandangan.[25]

Dalam kehidupan politik kontemporer, agama sering kali menjadi unsur penting dalam pembentukan identitas, orientasi moral, dan pertimbangan politik masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan warga negara untuk mengekspresikan keyakinannya di ruang publik. Namun, persoalan muncul ketika simbol dan narasi keagamaan digunakan secara manipulatif untuk memperoleh dukungan, membangun ketakutan, atau membentuk anggapan bahwa kelompok politik tertentu merupakan satu-satunya kelompok yang memiliki legitimasi moral dan keagamaan. Penggunaan agama dengan cara demikian dapat mempersempit ruang dialog dan menggeser perdebatan politik dari pembahasan program serta kebijakan menuju pertentangan identitas. Akibatnya, masyarakat cenderung menilai lawan politik bukan berdasarkan gagasan dan kinerjanya, melainkan berdasarkan stereotip keagamaan yang dilekatkan kepadanya.[26]

Dalam situasi tersebut, moderasi beragama berfungsi sebagai prinsip etis yang membatasi penggunaan identitas keagamaan secara eksklusif dan provokatif dalam komunikasi politik. Prinsip ini tidak melarang penggunaan nilai agama untuk memberikan orientasi moral terhadap kebijakan publik, tetapi menuntut agar nilai tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama. Aktor politik dapat menjadikan nilai agama sebagai inspirasi untuk memperjuangkan kesejahteraan, memberantas korupsi, melindungi kelompok rentan, dan meningkatkan keadilan sosial. Akan tetapi, penggunaan nilai agama tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk menyebarkan kebencian atau mendiskreditkan kelompok yang berbeda. Dengan demikian, moderasi beragama membantu membedakan antara penggunaan agama sebagai sumber etika publik dan penggunaan agama sebagai instrumen manipulasi politik.[27]

---

[24] Choirul Salim, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika," 34–40, https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.5681

[25] Muhammad Abqa, "Partai Politik dan Moderasi Beragama," 1–12, https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27

[26] Wardah Dede Aenul dan Kris Nandang, "Actualization of Uswatun Hasanah as a Framework for Islamic Moderation Against Religious Politicization in Indonesia," Journal of Religion and Social Transformation, https://doi.org/10.24235/zmvrmx46

[27] *Ibid*

Prinsip moderasi beragama dalam komunikasi politik juga berkaitan erat dengan keadilan. QS. Al-Ma'idah \[5\]: 8 menegaskan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Pesan ini memiliki relevansi yang kuat dalam situasi persaingan politik, ketika perbedaan kepentingan dapat menimbulkan prasangka dan permusuhan. Dalam komunikasi politik, keadilan menuntut agar seseorang tidak memutarbalikkan informasi tentang lawan politik, tidak menyebarkan tuduhan tanpa dasar, dan tidak menggunakan standar penilaian yang berbeda hanya karena adanya perbedaan afiliasi kelompok. Keadilan juga menuntut keterbukaan terhadap fakta yang tidak selalu mendukung kepentingan politik sendiri.[28]

Penerapan prinsip tersebut penting karena komunikasi politik dapat memengaruhi cara masyarakat menilai kelompok lain. Apabila seorang komunikator terus-menerus menyampaikan pesan yang menggambarkan lawan politik sebagai ancaman bagi agama atau masyarakat tanpa bukti yang memadai, pesan tersebut dapat memperkuat prasangka dan menurunkan kepercayaan antarkelompok. Sebaliknya, komunikasi yang adil memungkinkan masyarakat menilai persoalan berdasarkan informasi dan argumentasi yang relevan. Dalam hal ini, moderasi beragama tidak berarti bahwa semua pendapat harus dianggap benar atau semua tindakan politik harus diterima, melainkan bahwa penilaian terhadap suatu tindakan harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.[29]

Lebih jauh, moderasi beragama dapat dipahami sebagai etika dalam penggunaan bahasa politik. Bahasa merupakan instrumen utama untuk menyampaikan gagasan, membentuk persepsi, dan memengaruhi tindakan masyarakat. Pilihan kata yang merendahkan, mengancam, atau menggeneralisasi kelompok tertentu dapat memperburuk ketegangan sosial, terutama apabila disampaikan oleh tokoh yang memiliki pengaruh luas. Sebaliknya, bahasa yang santun, jelas, dan argumentatif dapat membantu menciptakan suasana komunikasi yang lebih terbuka. Dalam perspektif Al-Qur'an, etika penggunaan bahasa juga berkaitan dengan prinsip qaulan sadidan, yakni perkataan yang benar sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzab \[33\]: 70, serta nilai-nilai perkataan yang baik dan tepat dalam berbagai konteks komunikasi. Oleh karena itu, moderasi beragama dalam komunikasi politik perlu diwujudkan melalui pemilihan bahasa yang tidak menghasut, penyampaian kritik yang berorientasi pada perbaikan, dan penolakan terhadap ujaran yang merendahkan martabat manusia.[30]

Hubungan moderasi beragama dengan prinsip sidq menjadi penting dalam memastikan bahwa pesan politik yang berkaitan dengan agama tidak dibangun melalui kebohongan atau manipulasi fakta. Sidq mengharuskan komunikator menyampaikan informasi secara jujur, termasuk ketika informasi tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan kelompok politiknya. Dalam konteks kampanye politik, misalnya, seorang komunikator tidak seharusnya menyebarkan informasi palsu tentang identitas, keyakinan, atau rekam jejak lawan politik untuk membangkitkan sentimen keagamaan masyarakat. Kejujuran merupakan prasyarat bagi dialog yang sehat karena masyarakat hanya dapat mengambil keputusan secara rasional apabila memperoleh informasi yang benar. Tanpa kejujuran, seruan untuk bersikap moderat akan kehilangan dasar moralnya karena komunikasi tetap dibangun di atas manipulasi.[31]

---

[28] Aris Suhendar dkk., "Polarisasi Politik dalam Era Media Sosial," 25–39, https://doi.org/10.36985/c2ycyq62

[29] Arif Aminin dan Mohd. Rafiq, "Implementasi Tabayyun sebagai Etika Komunikasi Islam dalam Interaksi di Media Sosial," Spektra Komunika 5, no. 2 (2026): 258–270, https://doi.org/10.33752/spektra.v5i2.12270

[30] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., "Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial," Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 3, no. 2 (2025): 224–232, https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315

[31] Arif Aminin dan Mohd. Rafiq, "Implementasi Tabayyun," 258–270, https://doi.org/10.33752/spektra.v5i2.12270

Selain sidq, moderasi beragama memiliki hubungan erat dengan prinsip amanah. Dalam komunikasi politik, amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab formal oleh pejabat publik, tetapi juga dengan tanggung jawab moral setiap pihak yang memiliki kemampuan memengaruhi opini masyarakat. Tokoh politik, tokoh agama, pemimpin organisasi, dan pengguna media sosial yang memiliki pengaruh publik perlu menyadari bahwa pesan yang disampaikan dapat membawa konsekuensi sosial. Penyebaran informasi yang provokatif dapat memperburuk konflik, sedangkan pesan yang disampaikan secara hati-hati dapat membantu meredakan ketegangan. Karena itu, amanah menuntut komunikator untuk mempertimbangkan kebenaran informasi, konteks penyampaian, dan kemungkinan dampak pesan sebelum menyebarkannya. Dalam kerangka ini, moderasi beragama bukan hanya sikap pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam menjaga kualitas komunikasi publik.[32]

Hubungan moderasi beragama dengan prinsip tabayyun juga menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi perkembangan media digital. QS. Al-Hujurat \[49\]: 6 mengajarkan agar berita diperiksa sebelum dijadikan dasar tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam komunikasi politik, informasi yang mengandung isu agama sering kali mudah memicu reaksi emosional karena berkaitan dengan identitas dan keyakinan masyarakat. Apabila informasi semacam itu diterima tanpa pemeriksaan, masyarakat dapat dengan mudah menyebarkan tuduhan, membangun prasangka, atau mengambil sikap permusuhan terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu, tabayyun menuntut masyarakat untuk memeriksa sumber informasi, menilai konteks pernyataan, membandingkan keterangan yang tersedia, dan menghindari penyebaran konten yang belum terverifikasi. Moderasi beragama kemudian memberikan orientasi moral agar proses verifikasi tersebut dilakukan untuk mencari kebenaran dan mencegah kerugian sosial, bukan sekadar membenarkan kelompok sendiri.[33]

Keterkaitan keempat nilai tersebut menunjukkan bahwa etika komunikasi politik dalam perspektif Al-Qur'an tidak dapat dibangun hanya dengan satu prinsip. Sidq memastikan kebenaran pesan, amanah menegaskan tanggung jawab komunikator, tabayyun mengatur kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, sedangkan moderasi beragama mengarahkan komunikasi agar perbedaan dikelola secara adil dan damai. Keempatnya membentuk kerangka etis yang saling melengkapi. Sebagai contoh, ketika beredar potongan video yang menampilkan pernyataan seorang tokoh agama atau politik yang dianggap menyinggung kelompok tertentu, prinsip sidq menuntut agar isi pesan tidak diubah atau dipelintir, amanah mengharuskan pihak yang menyebarkan informasi mempertimbangkan dampaknya, tabayyun mengharuskan pemeriksaan terhadap sumber dan konteks video, sedangkan moderasi beragama mendorong masyarakat untuk tidak segera membangun permusuhan berdasarkan informasi yang belum jelas. Dengan cara tersebut, komunikasi politik dapat menjadi sarana klarifikasi dan penyelesaian masalah, bukan justru memperluas konflik.[34]

Relevansi moderasi beragama semakin besar ketika komunikasi politik berlangsung melalui media sosial. Platform digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengawasi tindakan pemerintah. Namun, karakter media sosial yang memungkinkan penyebaran pesan secara cepat juga dapat memperbesar dampak informasi yang salah atau provokatif. Pesan yang mengandung sentimen keagamaan dapat tersebar luas sebelum memperoleh klarifikasi, sedangkan algoritma dan pola interaksi pengguna

[32] *Ibid*
[33] *bid*
[34] Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., "Etika Komunikasi dalam Islam," 224–232, https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315

dapat mendorong pengulangan informasi yang sesuai dengan keyakinan atau kecenderungan kelompok tertentu. Dalam situasi demikian, masyarakat berisiko terjebak dalam lingkungan informasi yang memperkuat pandangan sendiri dan mengurangi kesediaan untuk mendengarkan perspektif yang berbeda.[35]

Untuk menghadapi kondisi tersebut, moderasi beragama perlu diterapkan melalui pembentukan budaya komunikasi digital yang bertanggung jawab. Pengguna media sosial perlu membedakan kritik yang sah terhadap kebijakan publik dari serangan terhadap identitas kelompok, serta menghindari penyebaran konten yang memuat penghinaan atau tuduhan tanpa bukti. Tokoh politik dan tokoh agama juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan dalam menggunakan bahasa yang tidak memprovokasi dan dalam mengklarifikasi informasi yang keliru. Sementara itu, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat berperan meningkatkan literasi digital serta pemahaman mengenai etika komunikasi. Upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang, tetapi untuk mendorong penggunaan kebebasan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak dan martabat orang lain.[36]

Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama dan budaya, moderasi beragama juga berkaitan dengan pemeliharaan persatuan nasional. Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan keragaman agama merupakan realitas sosial yang perlu dihormati. Keduanya tidak seharusnya dipertentangkan atau digunakan untuk membangun pembelahan permanen di tengah masyarakat. Komunikasi politik yang berorientasi pada kepentingan bersama dapat membantu masyarakat memahami bahwa perbedaan dukungan terhadap calon pemimpin atau partai politik tidak menghapus kedudukan setiap warga negara sebagai bagian dari kehidupan bersama. Oleh karena itu, narasi politik perlu diarahkan pada persoalan substantif, seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, keadilan, dan pelayanan publik, tanpa menjadikan identitas agama sebagai ukuran tunggal untuk menilai kelayakan seseorang dalam kehidupan politik.[37]

Penerapan moderasi beragama dalam komunikasi politik membutuhkan peran berbagai unsur masyarakat. Pejabat publik dan aktor politik perlu mengembangkan komunikasi yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Tokoh agama dapat memperkuat pemahaman bahwa ajaran agama mengandung nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Media massa perlu menjalankan fungsi informasi secara akurat dan berimbang, sedangkan masyarakat perlu mengembangkan sikap kritis terhadap pesan politik yang diterima. Lembaga pendidikan juga dapat berkontribusi dengan menanamkan literasi media, keterampilan berdialog, dan pemahaman mengenai keberagaman sejak dini. Kolaborasi tersebut diperlukan karena etika komunikasi politik tidak hanya bergantung pada perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya politik, dan kualitas ruang publik.[38]

Meskipun demikian, penerapan moderasi beragama tidak boleh dipahami sebagai tuntutan agar masyarakat selalu bersikap netral terhadap seluruh persoalan politik atau menghindari kritik terhadap ketidakadilan. Moderasi justru mengharuskan adanya keberpihakan terhadap nilai keadilan, kebenaran, dan perlindungan martabat manusia. Ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau pelanggaran hak masyarakat, komunikasi politik yang moderat tetap dapat menyampaikan kritik secara tegas. Hal yang

[35] Aris Suhendar dkk., "Polarisasi Politik dalam Era Media Sosial," 25–39, https://doi.org/10.36985/c2ycyq62
[36] Arif Aminin dan Mohd. Rafiq, "Implementasi Tabayyun," 258–270, https://doi.org/10.33752/spektra.v5i2.12270
[37] Muhammad Abqa, "Partai Politik dan Moderasi Beragama," 1–12, https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27
[38] Choirul Salim, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika," 34–40, https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i1.5681

membedakannya adalah cara kritik tersebut disampaikan, dasar argumentasi yang digunakan, dan tujuan yang hendak dicapai. Kritik yang didasarkan pada fakta serta diarahkan untuk memperbaiki keadaan berbeda secara mendasar dari komunikasi yang bertujuan mempermalukan, menghasut, atau menimbulkan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, moderasi beragama dapat berjalan seiring dengan keberanian menyampaikan kebenaran dan mengawasi kekuasaan.[39]

4. KESIMPULAN

Nilai-nilai komunikasi politik dalam Al-Qur'an yang meliputi sidq, amanah, tabayyun, dan moderasi beragama merupakan landasan penting dalam membangun komunikasi politik yang jujur, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Sidq menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang benar dan menghindari manipulasi, sedangkan amanah mengajarkan tanggung jawab, integritas, serta kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Selanjutnya, tabayyun menuntut setiap individu untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menerima atau menyebarkannya, sementara moderasi beragama mengarahkan komunikasi politik agar berlangsung secara adil, toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan. Keempat nilai tersebut saling melengkapi dalam menghadapi tantangan komunikasi politik di era digital, seperti penyebaran berita bohong, manipulasi informasi, ujaran kebencian, dan polarisasi masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam komunikasi politik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, menjaga kerukunan di tengah keberagaman, serta mewujudkan kehidupan demokrasi yang damai dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

5. REFERENCES

Ariatpi, Fina, dan Mulyawan Safwandy Nugraha. (2024). Implementasi Pengelolaan Kesiswaan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan

[39] Muhammad Abqa, "Partai Politik dan Moderasi Beragama," 1–12, https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27

Pendidikan Tahun 2022 di MIN 1 Kota Bandung. *JURNAL MAPPESONA, 7*(3), 127–137. https://doi.org/10.30863/mappesona.v7i3.5543

Ahadah, Sri, Nuril Fajar, Madrian Idris, and Siti Mardiana Harahap, 'Tafsir Ayat-Ayat Amanah Dan Partisipasi Perempuan Di Ruang Politik Digital', 5 (2025), 763–70

Aldiansyah, Rian, Badrudin Badrudin, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Maulana Hasanuddin, 'Kejujuran Dalam Perspektif Hadis : Kajian Terhadap Peran Kejujuran Dalam Membangun Karakter Muslim Dalam Kehidupan Sehari-Hari', 2025

Azizah, Hajar, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Article History, Plagirism Checker No, Tafsir Ibn, Pendidikan Anak, and others, 'Issn 3030-8917 123', 19 (2026)

Bukhori, Ahmad. (t.t.). *Rekonstruksi Manajemen Mutu Pesantren Melalui Pendekatan Total Quality Management (TQM)*. 4.

Damanik, Muhammad Zein, Dhea Melati Putri, and Mutia Alamiah Warda, 'Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan', 2, 554–64

Dewi, Lintang, 'Kejujuran Dan Verifikasi Informasi Dalam Komunikasi Digital : Analisis Etika Qur ' Ani Terhadap QS . Al -A ḥ z ā b [33]: 70', 01, 1–10

Etika, A Pengertian, 'Mirza Shahreza', 5, 1–62

Islam, Universitas, and Negeri Alauddin, 'Analisis Konsep Amanah Dan Tanggung Jawab Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam 1,2,3', 3 (2026), 1196–1208

Janji, Pemenuhan, Herdin Rahmawan, and Ujang Mimin Muhaemin, 'PENYEBAB POLITICAL DISTRUST PERSPEKTIF AL- QUR ' AN (Analisis Tafsir Maudhu ' i Ayat-Ayat Tentang Amanah Dan', 05 (2026), 52–70

Kebangsaan, Universitas, Republik Indonesia, Muh Amin, Universitas Islam, Negeri Sunan Kalijaga, and Komunikasi Politik, 'KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS AL- QUR ' AN : PREFERENSI PEMILIH MUSLIM DALAM PEMILU DI INDONESIA POLITICAL COMMUNICATION BASED ON THE AL-QUR , AN : MUSLIM VOTERS '', 5 (2024), 91–99

'Komunikasi Politik Di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta', 8 (2013)

Kokom, Euis, dan Yaya Suryana. (2019). Manajemen Kurikulum di Pesantren. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management, 2*(1). https://doi.org/10.15575/isema.v2i1.4995

Lutfhi, M Ilham, 'ETIKA ISLAM DALAM PRAKTIK KOMUNIKASI : KAJIAN ETIKA KOMUNIKASI ANTARPRIBADI DAN KOMUNIKASI', 5 (2026), 1–24

Muslim, Shafna Alifia, dan Wahyu Hidayat. (2024). Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Mutu Peserta Didik di SMA Negeri 26 Kota Bandung. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2*(2), 119–132. https://doi.org/10.37348/aksi.v2i2.378

'No Title', 11 (2026), 150–62

Pathollah, Akhmad Ghasi, dan Husnul Fadilatus Syarafah. (t.t.). *Manajemen Kurikulum Pesantren*.

Putri, Kharisma, Nur' Aini, Rahmayani Safitri, dan Rini Wahyuni Siregar. (2024). Sistem Administrasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *At-Tadzkir: Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi, 1*(1), 44–52.

Patamatta, Jeddah Dawi, Suci Emelsi Jeffri, Universitas Islam, Syekh Yusuf, Media Sosial, Hukum Islam, and others, 'LEGITIMASI KEKUASAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN DAN HUKUM ISLAM : ANALISIS', 10 (2026), 27–38

Perspektif, Pendidikan, and Al- Q U R An, 'Journal of Islamic Education Management', 1 (2023), 64–71

Sa'adah, Juwita Qoyyimatus, Shiva Aulia Ramadhani, Navaya Aurelia Kurnia Devi, Novi Shofariyah, Afin Najwa Aulia, Isa Rahma Farzana, Ayu Wulandari, dan Nuphanudin. (2023). Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik SMA Wachid Hasjim 3 Sedati. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 2*(4), 514–515. https://doi.org/10.31004/jpion.v2i4.207

Satrio, Satrio, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, dan Ahmad Fadhil Rizki. (2021). Administrasi Kurikulum, Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Tinjauan Administasi Sekolah. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management, 4*(2), 92. https://doi.org/10.24014/ijiem.v4i2.13057

Siti Aimah. (2021). Manajemen Mutu Terpadu di Pesantren. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 15*(2), 195–226. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i2.1608

Sonata Al Fatiqh, Atika Mujahidah, dan Nehha Kusuma Wati. (2023). Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMPN 40 Surabaya. *ARZUSIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar, 3*(6), 857–865. https://doi.org/10.58578/arzusin.v3i6.2043

Tiara Alivia, Akhmad Ramli, dan Sudadi. (2024). Implementasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Madako Education, 10*(2), 42–45. https://doi.org/10.56630/jme.v10i2.1461